

**KONFLIK DALAM DINAMIKA POLITIK PERDESAAN
(Studi Pada Pilkades di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur NTB)**

**THE CONFLICTS OF POLITICAL DYNAMIC IN RURAL AREA
(A Study Of Head Village Election In Sikur District, East Lombok, NTB)**

Busyairi Ahmad¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan melakukan pengkajian terhadap konflik dalam dinamika politik pedesaan di kecamatan Sikur yang selanjutnya menawarkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang mempunyai kewenangan di dalam menentukan kebijakan-kebijakan tentang bagaimana mengelola konflik yang marak terjadi pada pilkades di kecamatan Sikur, dengan harapan dapat membawa manfaat pada bentuk keharmonisan hidup dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sikur dengan menggunakan pendekatan fungsional konflik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya konflik dalam pilkades di Kecamatan Sikur karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor internal dan eksternal namun yang determinan penyebab konflik tersebut adalah faktor eksternal. Adapaun terjadinya konflik yang berkelanjutan pada pilkades tersebut karena selalu adanya sifat dendam yang selalu hadir pada tiap pendukung calon, adanya kepentingan dan selain itu juga karena adanya sifat nepotisme kepemimpinan kades terpilih. Adapun resolusi yang dapat ditawarkan dalam hal ini adalah resolusi konflik berbasis karma desa dan menegakkan kembali public sphere masyarakat sasak.

Kata Kunci: Konflik, Dinamika Politik, Perdesaan

Abstract

This study aims to conduct an assessment of the political dynamics of the conflict in the countryside in the district Sikur which in turn offers to the public or the parties who have authority in determining the policies on how to manage conflict is rife in the village elections in the district Sikur, hoping to bring benefits in the form of the harmony of life in society. This research was conducted in the District Sikur using a functional approach to the conflict. Data collection methods used were observation, interviews, and documentation. The results showed that the conflict in village elections in the district because Sikur caused by several factors such as internal and external factors but that the determinant cause of the conflict is external factors. The ongoing conflict in the village elections because it is always the nature of revenge that is always present at each candidate's supporters, their interests and it is also because of the nature of leadership nepotism elected village heads. The resolution that can be offered in this case is based conflict resolution village karma and re-establish public sphere Sasak society.

Keywords: Conflict, Political Dynamics, Rural.

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2013

Pendahuluan

Gerakan reformasi di Negara Indonesia merupakan suatu gerakan yang dapat membawa perubahan dalam tata kehidupan dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Salah satunya adalah diberikannya kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, baik berupa keritikan maupun dukungan yang dapat membawa perubahan yang lebih baik. Sehingga negara Indonesia menjadi negara yang demokratis. Oleh karena itu, muncullah semboyan dalam demokrasi yaitu; *"Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat"*.

Berangkat dari sistem demokrasi di Indonesia melahirkan sistem desentralisasi yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Olehnya itu, sistem pemerintahan Indonesia tidak lagi bergantung pada pemerintahan pusat. Namun bersifat desentralisasi yaitu pemerintah daerah diberikannya wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dari pemberian wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus daripada urusan pemerintahan maka pemerintahan desa juga diberikan kekuasaan dan wewenang untuk mengelola sumber daya dan sistem pemerintahan sendiri. Sehingga sistem demokrasi di Indonesia benar-benar merata.

Beranjak dari sistem pemerintahan yang demokratis, tentu dalam pementuan penguasa harus berdasarkan pemilihan langsung oleh masyarakat sebagaimana semboyan dari demokrasi tersebut. Sehingga dalam pemeilihan penguasa bukan saja terlaksana pada pemilihan kepala nengara saja namun

juga pada penentuan penguasa desa atau kepala desa.

Adapun dalam pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi yang sudah diatur oleh negara sebagaimana yang diatur dalam UU RI Nomor 6 tahun 2014 pada Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3) yaitu; Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa; Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

Selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana dijelaskan pada pasal 40 ayat (1) yaitu; Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota dan dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Sehingga berangkat dari UU dan PP Republik Indonesia tentang desa tersebut menggambarkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub-sistem dari penyelenggaraan pemerintahan negara indonesia.

Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi, sehingga masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam perpolitikan desa dengan memberikan suara dalam pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa tersebut merupakan keharusan yang sangat penting untuk dilaksanakan, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selain itu juga, pemilihan kepala desa merupakan ajang sosialisasi politik di tingkat desa yang dapat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat desa. Adapun dalam pemilihan kepala desa tentu saja identik dengan adanya kampanye yang dilaksanakan oleh para aktor-aktor politik, guna untuk menarik dukungan dan simpati dari masyarakat. Tahap kampanye inilah yang

sangat menarik dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, dimana masing-masing calon kepala desa beserta pendukungnya berlomba-lomba memperkenalkan diri, memberikan janji-janji, melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui proses komunikasi politik selayaknya kampanye yang dilakukan oleh calon-calon legislatif.

Oleh karena itu, pelaksanaan pemilihan kepala desa akhir-akhir ini sudah terkontaminasi oleh perilaku para elit politik yang sering dipertontonkan diberbagai media, baik media cetak maupun media elektronik, tentang perilaku politik yang tidak sehat, seperti adanya politik uang (*money politik*) maupun kampanye hitam (*black campaign*). Sehingga dengan perilaku politik demikian mengakibatkan para penguasa didominasi oleh orang-orang yang bermodal bukan orang yang berkompetensi dalam memimpin.

Praktik politik uang dan kampanye hitam ditingkat lokal semakin hangat, sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Sikur pada saat pemilihan kepala desa Loyok pada tahun 2011 pada proses kampanye, salah satu calon menggunakan politik uang. Sehingga hal itulah sebagai pemicu terjadinya konflik yang berujung anarkis dalam pemilihan Kepala Desa Loyok, adapun proses terjadinya konflik tersebut berawal dari kekecewaan warga pendukung salah satu calon yang dinyatakan kalah sehingga melakukan konflik dan menyegel Kantor Desa Loyok, hal tersebut merupakan bentuk dari kekecewaan dari sebagian warga yang tidak menerima kekalahan. Hal serupa juga terjadi di Desa Gelora dan desa Semaya kecamatan Sikur pada tahun 2011 di bulan yang berbeda, munculnya konflik dalam pemilihan Kepala Desa tersebut karena adanya ketidakpuasan salah satu dari pendukung atau simpatisan calon yang tidak terpilih dan menganggap calon terpilih curang dengan menggunakan politik uang. Sehingga melakukan gerakan

demonstrasi yang berujung anarkis yang berupa perusakan kantor desa oleh massa pendukung calon yang dinyatakan kalah dalam pemilihan tersebut.

Berdasarkan dari fenomena konflik yang kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat desa di Kecamatan Sikur pada proses perpolitikan sangat bertolak belakang dengan apa yang menjadi karakter masyarakat setempat. Dalam hal ini, jika dirunut dari sejarah masyarakat Lombok pada umumnya yang menjunjung tinggi nilai kearifan lokal dengan menjaga keharmonisan dan keamanan dalam segala aspek kehidupan, terlebih lagi dalam menentukan pemimpin atau kepala desa.

Adapun masyarakat Lombok pada prinsipnya dalam menentukan pemimpin selalu berkiblat pada orang yang mereka segani seperti tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Hal tersebut terbukti ketika terjadi penentuan kepala adat seperti "*Keliang*" (Kadus) dan "*Jero Kepele*" (Kepala Desa). Karakter masyarakat Lombok yang menjaga keharmonisan karena berlandaskan pada Semboyan suku Sasak dalam penyelesaian masalah dengan penuh kearifan, seperti terkandung dalam semboyan (Bahasa Sasak) "*empa' bau tunjung tilah ai' meneng*" yang maknanya, jika menyelesaikan masalah dilakukan secara arip dan bijaksana, tidak menimbulkan gejolak dan masing-masing pihak merasa puas dan adil. Sehingga diibaratkan bagai menangkap ikan di kolam dan ikan tertangkap bunga teratai tetap utuh (tidak rusak karena tidak diaduk-aduk atau diobok-obok), sehingga air tetap jernih tidak keruh, maksudnya filosofinya adalah jika ada permasalahan maka harus diselesaikan dengan cara adat dan tanpa menimbulkan percekocokan atau konflik sehingga terbentuk masyarakat yang harmonis.

Selain itu juga, masyarakat suku Sasak dalam berpolitik sangat taat dan patuh

terhadap orang-orang yang memiliki karismatik seperti Tuan Guru (Kiyai) dan pemangku adat seperti ketua adat, sebagaimana yang tergambar dalam semboyan Sasak (Bahasa Sasak) "*embe lain jaum ie lain benang*" artinya dimana pilihan para pemimuka itulah pilihan warga. Sehingga sangat jarang terjadinya konflik dalam penentuan penguasa seperti pemilihan *Jero Kepele* (Kepala Desa) begitu juga dengan *Keliang* (Kapala Dusun).

Namun dilihat dari perkembangan zaman sekarang, dengan munculnya konflik ditengah-tengah kehidupan masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa, maka sangat tidak sesuai dengan apa yang menjadi karakter dan peninggalan leluhur dari masyarakat suku Sasak. Apalagi dikaitkan dengan adanya politik uang dan kampanye hitam yang terjadi dalam proses perpolitikan lokal, hal ini merupakan sifat ketidakjujuran sudah terjadi ditengah-tengah masyarakat desa di kecamatan sikur.

Adapun yang lebih ironisnya lagi, dalam proses pemilihan kepala desa di kecamatan Sikur sudah bermunculan perjudian yang dilakukan oleh segolongan orang, sehingga dalam proses kampanye para penjudi tersebut juga berperan aktif untuk membantu dari salah satu calon kepala desa yang mereka taruhkan. Hal tersebut besar dugaan dapat memicu konflik dalam pemilihan kepala desa di Kecamatan sikur.

Adapun konflik kepentingan tersebut identik dengan konflik politik. Realitas politik selalu diwarnai oleh dua kelompok yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan. Benturan tersebut dipicu oleh gejala satu pihak ingin merebut kekuasaan dan kewenangan dalam masyarakat, di pihak lain terdapat kelompok yang berusaha mempertahankan kekuasaan dan kewenangan di tangan mereka (Setiadi & Kolip, 2011: 353).

Namun hal tersebut merupakan suatu fenomena yang harus dijaga, sehingga tidak terjadi perselisihan yang hingga berujung anarkis demi keharmonisan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, berangkat dari fenomena kasus konflik yang sering terjadi di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses pemilihan Kepala Desa merupakan fenomena yang menarik bagi peneliti untuk dikaji. Maka peneliti mencoba untuk melakukan penelitian yang terkait dengan konflik dalam dinamika politik di kecamatan Sikur.

Sesuai dengan judul yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu "Konflik Dalam Dinamika Politik Pedesaan", maka penelitian ini bertujuan menguarai dan menganalisis konflik politik yang terjadi di kecamatan Sikur pada pemilihan kepala desa secara komprehensif dengan melihat berbagai fenomena yang muncul dalam perjalanan konflik tersebut serta dengan memperhatikan intensitas, eskalasi, jenis, sifat dan motif-motif konflik yang mewarnai proses pemilihan dan pergantian kekuasaan desa.

Dalam penelitian ini, ada beberapa hal penting yang perlu di garis bawahi untuk menganalisis konflik dalam dinamika politik pedesaan yang ada di kecamatan Sikur. beberapa fenomena yang bersifat lokal yang muncul dalam konflik dinamika politik pedesaan yakni; dengan seringnya terjadi konflik dalam perpolitikan di tengah-tengah masyarakat yang kuat dalam menjaga keharmonisan dan memegang teguh kearifan lokal yang di tinggalkan oleh leluhur.

Adapun salah satu ajang menjaga keharmonisan masyarakat setempat melakukan integrasi dengan membentuk persatuan *Banjar* (persatuan arisan), baik *banjar bajang* maupun *banjar* kalangan tua, hal tersebut merupakan ajang untuk mempererat persatuan masyarakat di Kecamatan Sikur. Namun meski demikian selalu terjadi konflik dalam pemilihan kepala

Desa. Sehingga berangkat dari hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang konflik dalam dinamika politik pedesaan dalam hal ini pada kasus pemilihan kepala desa di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan melihat faktor penyebab terjadinya konflik dan resolusi dari konflik politik pada pemilihan kepala desa di Kecamatan Sikur.

Kajian Pustaka

Konsep Konflik

Istilah konflik secara etimologi berasal dari bahasa latin "*con*" yang berarti bersama dan "*fligere*" yang berarti benturan atau tabrakan, dengan demikian, "konflik" dalam kehidupan berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih (Setiadi & Kolip, 2011: 347).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), konflik adalah percekocokan, perselisian, pertentangan, atau ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama (pertentangan antara dua kekuatan, pertentang dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dsb);

Menurut Webster (1966), istilah "*conflict*" di dalam bahasa aslinya berarti suatu "perkelahian, peperangan, atau perjuangan"-yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata ini kemudian berkembang dengan masuknya "ketidak sepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain", dengan kata lain, istilah tersebut menyentuh aspek psikologis dibalik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi fisik itu sendiri. Secara singkat, istilah "*conflict*" menjadi begitu meluas sehingga beresiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep tunggal (Pruit & Rubin, 2011: 9).

Adapun konflik merupakan kenyataan hidup yang tidak terhindarkan dan selalu ada (Abdullah, 2006: 234). Kehadirannya bisa saja dibutuhkan karena dapat mendorong ke arah perubahan yang diperlukan bagi perkembangan individu/ pribadi, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Persoalan yang kita hadapi di Indonesia saat ini, pada hakikatnya berkaitan dengan konflik yang terwujud dalam bentuk kekerasan yang menyebabkan kerusakan fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, secara konseptual perlu dibedakan antara konflik dan kekerasan.

Konflik adalah "hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran yang tidak sejalan". Sementara itu, kekerasan adalah "tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial, atau lingkungan, dan atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh". Menurut Fisher (Abdullah, 2006: 234), konflik berubah menjadi kekerasan jika: a) Seluruh dialog dan wadah untuk mengungkapkan perbedaan pendapat tidak memadai; b) Ketidaksepakatan dan keluhan yang terpendam tidak didengar dan diatasi; c) Ketidakstabilan, ketidakadilan, dan ketakutan dalam masyarakat yang lebih luas.

Berdasarkan dari beberapa hal di atas sangat jelas di sini, beberapa persoalan yang perlu kita perhatikan adalah saluran dan wadah dialog yang tidak memadai, suara-suara yang tidak sepakat, dan ketidakstabilan sosial. Adapun model ini, ledakan konflik menandakan adanya suatu gagasan dalam pekerjaan rutin organisasi itu, dan menyelesaikan konflik (atau krisis manajemen) dilihat sebagai mengalihkan manajemen itu dari fungsi yang sebenarnya dalam mengambil keputusan, koordinasi tugas, serta peningkatan kerja sama.

Menurut Stephen Robbins, konflik biasanya mengikuti satu pola teratur yang terdiri dari lima tahap; adanya potensi oposisi atau ketidakcocokan, kognisi dan personalisasi, maksud, perilaku, dan hasil (dalam Ujan, 2011: 88).

Konsep Dinamika Politik

Dinamika politik pada dasarnya terdiri dari dua kata yang berbeda yaitu dinamika dan politik. Dalam hal ini kata dinamika berasal dari bahasa Yunani yaitu *Dynamics* yang bermakna "kekuatan" (*force*). Dinamika berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung mempengaruhi warga yang lain secara timbal balik. Dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok keseluruhan (Santoso, 2004: 5).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) dinamika mengandung pengertian dinamis (selalu berubah-ubah). Adapun menurut istilah Pierre Bourdieu, dinamika tersebut mencerminkan sebuah struktur yang menstrukturkan dan struktur yang distrukturkan. Maksudnya, ada sebuah struktur yang mengalami proses *in* dan *out* secara simultan yang menyebabkan struktur tersebut berada pada posisi yang tidak stagnan (Jenkins, 2001). Proses semacam ini oleh antropolog George Balandier (1991), dalam *Antopologie Politique*, mewujudkan dalam proses internalisasi dan eksternalisasi yang menyebabkan terjadinya dinamika tersebut.

Berdasarkan dari pemaparan diatas dapat di simpulkan bahwa dinamika adalah suatu tenaga yang selalu bergerak dan berkembang serta dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada.

Sedangkan politik berasal dari bagasa Yunani "*polis*" yang artinya Negara-kota. (Basrowi,dkk, 2012: 2). Sementara itu, menurut Maran politik merupakan studi

kasus tentang cara manusia memecahkan permasalahan bersama dengan manusia yang lain. Dengan kata lain, politik merupakan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau Negara yang menyangkut proses penentuan dan pelaksanaan tujuan-tujuan (Basrowi dkk. 2012: 4-5).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) politik di maknakan *n* 1 (pengetahuan) sebagai ketata negaraan atau negara (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan); 2 segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb). Berdasarkan dari pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diatas, dapat disimpulkan bahwa politik adalah siasat/cara atau taktik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sehingga pengertian politik secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah kegiatan dalam suatu sistem politik atau Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya.

Istilah politik (*politics*) sering dikaitkan dengan bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik ataupun negara yang menyangkut proses penentuan tujuan sampai dalam melaksanakan tujuan tersebut.

Disamping itu, menyangkut pengambilan keputusan (*decision making*) tentang apakah yang menjadi tujuan sistem politik yang menyangkut seleksi antara beberapa alternatif serta penyusunan untuk membuat skala prioritas dalam menentukan tujuan-tujuan itu (Supardan, 2011: 492).

Menurut Kal W. Deutsch. Mitchell (1969: 4-5) mengemukakan "politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan publik untuk suatu keseluruhan masyarakat". Kemudian Deutsch (1970: 5) mengatakan: "*politics is the making of decision by publics means*" artinya Politik adalah pembuatan keputusan oleh alat-alat politik (Supardan, 2011: 493).

Adapun politik adalah proses pembentukan dan pembagian keputusan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalil negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: pertama politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles); kedua; politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara; ketiga politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat; keempat; politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik (Anwar & Adang, 2013: 341).

Adapun Max Weber, bahwa yang dinamakan dengan politik adalah:

“sarana perjuangan untuk bersama-sama melaksanakan politik, atau perjuangan untuk mempengaruhi pendistribusian kekuasaan, baik diantara negara-negara maupun diantara kelompok-kelompok di dalam suatu negara” (Anwar & Adang, 2013: 346).

Politik secara hakiki dipandang sebagai pergolakan, pertempuran. Adapun dalam kenyataan, apa yang disebut politik itu senantiasa ambivalen. Di satu sisi, kekuasaan di jadikan alat untuk mendominasi orang atau pihak lain. Di sisi lain, kekuasaan dijadikan sarana untuk menjamin ketertiban sosial tertentu atau sebagai alat pemersatu.

Berdasarkan kedua konsep dinamika dengan politik diatas, maka Dinamika Politik adalah pergerakan kebijakan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, di Negara

Indonesia sejak 17 Agustus 1945 samapai dengan saat ini sudah banyak mengalami dinamika dalam perpolitikan negara. Hal ini terbukti dengan melihat perkembangan demokrasi di Indonesia yaitu mulai dari masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan di lanjutkan dengan masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dan demokrasi konstitusional yang lebih banyak menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat.

Selanjutnya, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Kemudian yang terakhir adalah masa sekarang yaitu masa Demokrasi Pancasila era Reformasi dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru.

Konflik Politik.

Dalam dunia politik: “*tiada lawan yang abadi dan tiada pula kawan yang abadi, kecuali kepentingan abadi*”. Dengan demikian konflik kepentingan identik dengan konflik politik. Realitas politik selalu diwarnai oleh dua kelompok yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan. Benturan tersebut dipicu oleh gejala satu pihak ingin merebut kekuasaan dan kewenangan di dalam masyarakat, di pihak lain terdapat kelompok yang berusaha mempertahankan kekuasaan dan kewenangan di tangan mereka (Setiadi & Kolip, 2011: 353, 360).

Dunia perpolitikan merupakan sebuah arena persaingan yang dilakukan oleh para elit politik. Dalam sebuah persaingan itu terdapat sebuah perbedaan ideologi yang bisa memicu dari timbulnya konflik, baik konflik

dalam bentuk individual maupun dalam kancan kelompok.

Perbedaan-perbedaan ideologi dalam perpolitikan memang tidak bisa dipungkiri. Hal tersebut terlihat begitu banyaknya isu-isu yang terdengar dari berbagai pihak yang menandakan bahwa dalam dunia politik memang tidak terlepas dari sebuah konflik, karena secara garis besar konflik adalah perselisihan atau persengketaan antara dua atau lebih kekuatan baik secara individu atau kelompok yang kedua belah pihak memiliki keinginan untuk saling menjatuhkan atau mengalahkan atau menyingkirkan (Stiadi & Kolip, 2011: 359).

Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian: Jenis penelitian kualitatif (*Qualitative reseaceh*). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Studi kasus (*case study*), Studi kasus (*case study*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap satu kesatuan sistem.

Fokus Lokasi Penelitian dan Informan: Adapun penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat yang di fokuskan pada 3 desa yang ada di kecamatan Sikur yaitu Desa Loyok, Desa Semaya dan Desa Gelora, peneliti memfokuskan pada tiga desa tersebut karena selalu terjadi konflik dalam pemilihan Kepala Desa.

Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang-orang atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam arena konflik. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam menentukan informan dilakukan secara sengaja (*Purposive Sampling*), dimana *purposive sampling* merupakan tehnik pengambilan sumber data dengan karakteristik tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang kondisi

lapangan atau mengetahui apa yang peneliti harapkan.

Deskripsi Fokus Penelitian, a) Konflik adalah percekcoakan, perselisian, pertentangan, atau ketegangan atau pertentangan antara dua kekuatan, pertentang dalam diri satu tokoh. Menurut Webster (1966); b) Dinamika Politik diartian sebagai pergerakan atau prubahan kekuasaan;; c) Faktor diterminan terjadinya konflik adalah yang menjadi penyebab utama terjadinya konflik dalam pemilihan kepala desa tersebut; d) Resolusi konflik adalah Menangani sebab-sebab konflik dan membangun hubungan baru.

Tehnik Pengumpulan Data: a) Observasi; b) Wawancara (*interview*); c) Dokumentasi

Tehnik Analisis Data: Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, penarikan/verifikasi kesimpulan.

Tehnik Keabsahan Data: Menurut Sugiyono (2011), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (objektivitas). Berdasarkan keempat syarat tersebut, uji keabsahan data

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya konflik dalam pilkades di Kecamatan Sikur karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor internal dan eksternal namun yang determinan penyebab konflik tersebut adalah faktor eksternal. Adapun faktor determian terjadinya konflik dalam pilkades di kecamatan Sikur yaitu:

Faktor internal: a) Kurangnya kontrol sosial dari pihak panitia pemilihan dan pihak terkait; b) Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Pilkades; c) Adanya sifat dendam antar simpatisan; d) Rendahnya

pemahaman politik; e) Hegemoni kaum bangsawan di kecamatan Sikur.

Faktor eksternal : a) Bias konflik Ormas dalam pilkades; b) Implikasi perilaku berjudi dalam pilkades

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis data yang di peroleh bahwa yang menjadi penyebab terjadinya konflik yang berkelanjutan pada tiga desa di kecamatan Sikur adalah sama. Hal tersebut sesungguhnya dikarenakan adanya sifat dendam yang selalu ada pada diri para kontestasi politik desa, baik itu dendam pribadi maupun dendam kelompok dalam perebutan kekuasaan. Berangkat dari adanya dendam tersebut mengakibatkan terjadinya perseteruan yang tiada ujungnya.

Dalam segi resolusi dalam memecahkan permasalahan konflik di tiga desa pada Pilkades sesungguhnya sama, karena dalam hal ini adanya peran dari pihak kepolisian dan pihak pemerintah kecamatan seperti KPU kecamatan dan panitia lainnya. Adapun salah satu cara yang digunakan adalah dengan cara memberikan ancaman kepada pihak yang berkonflik, memberikan mediasi terhadap orang-orang yang terlibat dalam konflik tersebut. Selanjutnya, membuat surat perjanjian terhadap beberapa calon dan pendukung untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, peneliti juga menawarkan resolusi konflik dalam pilkades di kecamatan sikur yaitu: a) *Reinventing Krama* Desa sebagai Kontrol sosial; b) Meneguhkan kembali *public sphere* masyarakat sasak; c) Pemanfaatan peraturan Pilkades yang telah di tentukan dalam UU Desa.

Kesimpulan: 1) Adapun faktor determian terjadinya konflik dalam pilkades di kecamatan Sikur yaitu : a) Faktor internal terjadinya konflik Kurangnya kontrol sosial dari pihak panitia pemilihan, Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam

Pilkades, Adanya sifat dendam antar simpatisan, Rendahnya pemahaman politik, Hegemoni kaum bangsawan di kecamatan Sikur; b) Faktor eksternal, Bias konflik Ormas dalam pilkades, Implikasi perilaku berjudi dalam pilkades. 2) Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis data yang di peroleh bahwa yang menjadi penyebab terjadinya konflik yang berkelanjutan pada tiga desa di kecamatan Sikur adalah sama. Hal tersebut sesungguhnya dikarenakan adanya sifat dendam yang selalu ada pada diri para kontestasi politik desa, baik itu dendam pribadi maupun dendam kelompok dalam perebutan kekuasaan. Berangkat dari adanya dendam tersebut mengakibatkan terjadinya perseteruan yang tiada ujungnya; 3) Adapun salah satu cara yang digunakan adalah dengan cara memberikan ancaman kepada pihak yang berkonflik, memberikan mediasi terhadap orang-orang yang terlibat dalam konflik tersebut. Selanjutnya, membuat surat perjanjian terhadap beberapa calon dan pendukung untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, peneliti juga menawarkan resolusi konflik dalam pilkades di kecamatan sikur yaitu: a) *Reinventing Krama* Desa sebagai Kontrol sosial; b) Meneguhkan kembali *public sphere* masyarakat sasak; c) Pemanfaatan peraturan Pilkades yang telah di tentukan dalam UU Desa.

Daftar Pustaka

- Abdullah, I., Wening, U., & Hasse, J. 2009. *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Kontemporer*. Yogyakarta: Tici Publications bekerjasama Pustaka Pelajar.
- Abdullah, T. 2006. *Ilmu Sosial dan Tantangan Zaman*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Yesmil & Adang. 2013. *Sosiologi untuk Universitas*. Bandung: PT Rafika Aditama.

- Basrowi. Dkk. 2012. *Sosiologi Politik*. Bogor: Galia Indonesia.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: PT Prenada Media Group.
- Hasbullah, J. 2006. *Social Capital (Menuju Keunggulan Manusia Indonesia)*. Jakarta: MR-United Press.
- Johnson, D. P. 1986. *Teori-teori Sosiologi Klasik dan Modern*. (Robert MZ Lawang, penterjemah), Jilid 1,2. Jakarta: PT Gramedia.
- Jumadi. 2009. *Tawuran Mahasiswa (Studi Dinamika Konflik Sosial Di Makassar)*. Disertasi. Program Pasacasarian Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Nasir, N. 2009. *Teori-Teori Sosiologi*. Bandung: PT Tim Widya Padjadjaran.
- Poloma, M. M. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pruitt, D. G. & Jeffrey Z. R. 2011. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Raho, B. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: PT Prestasi Pustaka.
- Satori, D. & Aan K. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabea.
- Setowara, Subhan & Soimin. 2013. *Agama dan Politik Moral*. Malang: Intrans Publishing.
- Simon, Roger. 2004. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Stiadi, M. E. & Usman K. 2011. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sukamadinata, S.N. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Supardan, Dadang. 2011. *Pengantar Ilmu Sosial; Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Suyanto, B. & Sutinah. (Eds.), 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Grup.
- Ujan, A. A. dkk. 2011. *Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama Dalam Perbedaan*. Jakarta: PT. Indeks.
- Wirawan, I. B. 2012. *Teori-Teori Sosiologi; Dari Filosofi Positivistik Ke Post Positivistik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zeitlin, I. M. 1995. *Memahami Kembali Sosiologi: Kritik Terhadap Sosiologi Kontemporer*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.